



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP)  
**2022**



PEMERINTAH  
KABUPATEN LUMAJANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ridho-Nya semata Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi laporan ini menguraikan tentang gambaran informasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, yang di dalamnya mencakup gambaran capaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, keberhasilan maupun tidak keberhasilan, inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selaku Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Hasil Review Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018 – 2023.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Selama tahun 2022, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholder* kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan peningkatan kinerja bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang serta semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Lumajang, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG



**Ir. PAIMAN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670606 199202 1 001**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini disusun. LKJIP ini menyampaikan capaian kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang selama tahun 2022 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKJIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJIP Tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dari keseluruhan bidang tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, tentunya tidak hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan namun juga dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum dalam rangka mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan tujuan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG  
TAHUN 2022**

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Ruang Lingkup	3
B. Gambaran Umum dan Tupoksi	3
1. Kondisi Kepegawaian	4
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	7
II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Strategis	8
1. Tujuan	8
2. Sasaran	8
3. Strategi dan Kebijakan	9
4. Program dan Kegiatan	9
5. Cara mencapai Tujuan dan Sasaran	13
6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	14
B. Perjanjian Kinerja	32
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	33
B. Akuntabilitas Keuangan	62
C. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah	80
IV. PENUTUP	82

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

##### **1. LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lumajang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada khususnya serta pembangunan Regional dan Nasional pada umumnya yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing.

Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (*digital divide*) pada sebagian kelompok masyarakat.

Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.

Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi *e-government* yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep



yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.

Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (*user*). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya *e-government* merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.

Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, dapat menjadi agen manajemen informasi sekaligus sebagai *public relation* seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.

Sebagai bentuk tanggung jawab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2022 sesuai dengan program/ kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2022, sehingga LKJIP ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah sebagai

penjabaran Misi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

### **3. RUANG LINGKUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 dibatasi pada Penyajian Kinerja yang terkait dengan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022.

### **B. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) yang menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang pesandian yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 66 orang yang terdiri dari 25 orang PNS dan 41 orang Tenaga Honorer.

Berikut kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021.



## 1. KONDISI KEPEGAWAIAN

Formasi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan Tenaga Honorer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	Tenaga Honorer		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0
3	SMA/SMK	7	16	23	35 %
4	D3	5	2	7	11 %
5	S1	11	22	33	50 %
6	S2	2	1	3	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan informatika memiliki pegawai terbanyak pada jenjang pendidikan Sarjana (S1) yaitu 50% (33 orang). Sedangkan untuk jenjang SMA/ SMK sebanyak 35% (23 orang), SMP sebesar 5% (0 orang) dan D3 sebesar 11% (7 orang). Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 berdasarkan Pangkat/ Golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Golongan**

No	Golongan	Jumlah	%
1	Golongan I	0	0%
2	Golongan II	6	24%
3	Golongan III	17	68%
4	Golongan IV	2	8%
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 sebagian besar Golongan Ruang III yaitu sebanyak 68% (17 orang),

Golongan II yaitu sebanyak 24% (6 orang) dan Golongan IV yaitu sebanyak 8% (2 orang) dan golongan I sebanyak 0 % (0 orang). Disamping pendidikan formal, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang telah mengikuti pendidikan struktural yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural**

No	Tingkat Diklat PIM	Jumlah
1	I	0
2	II	0
3	III	1
4	IV	6
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sedangkan jika dilihat berdasarkan eselon maka ditunjukkan oleh Tabel 1.4.

**Tabel 1.4**  
**Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Berdasarkan Eselon**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1	I <b>IIb</b>	1
2	III <b>a</b>	1
3	III <b>b</b>	3
4	IV <b>a</b>	11
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut.

**Tabel 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Berdasarkan Jenis, Jumlah dan**  
**Kondisi**

No	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
				Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>GOLONGAN TANAH</b>	<b>0</b>			
	01.01.	- Tanah	0	-	-	-
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>691</b>			
	02.02.	- Alat-Alat Besar	2	2	-	-
	02.03.	- Alat-Alat Angkutan	17	17	-	-
	02.04.	- Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur	1	1	-	-
	02.05.	- Alat-Alat Pertanian	0	-	-	-
	02.06.	- Alat-Alat Kantor Dan Rumah Tangga	621	621	-	-
	02.07.	- Alat-Alat Studio & Komunikasi	50	50	-	-
	02.08.	- Alat-Alat Kedokteran	0	-	-	-
	02.09.	- Alat-Alat Laboratorium	0	-	-	-
	02.10.	- Alat-Alat Persenjataan / Keamanan	0	-	-	-
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>9</b>	9	-	-
	03.11.	- Bangunan Gedung	9	9	-	-
	03.12.	- Monumen	0	-	-	-
<b>04</b>	<b>04</b>	<b>GOLONGAN JALAN. IRIGASI, DAN JARINGAN</b>	<b>0</b>	-	-	-
	04.13.	- Jalan Dan Jembatan	0	-	-	-
	04.14.	- Bangunan Air / Irigasi	0	-	-	-
	04.15.	- Instalasi	0	-	-	-
	04.16.	- Jaringan	0	-	-	-
<b>05</b>	<b>05</b>	<b>GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>0</b>			
	05.17.	- Buku Dan Perpustakaan	0	-	-	-
	05.18.	- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	0	-	-	-
	05.19.	- Hewan, Ternak Dan Tanaman	0	-	-	-
<b>06</b>	<b>06</b>	<b>GOLONGAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	-	-	-

## **2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang serta dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

### **a. Tugas**

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

### **b. Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021. Adapun fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

##### **1. Tujuan**

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan P-RPJMD Kabupaten dan P-Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”

##### **2. Sasaran**

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Indikator sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi “ adalah Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu, yang dihitung dengan formula Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu dibagi Jumlah PD yang ada dikali 100%.

b) Meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik.

Indikator sasaran “Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik” adalah Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir yang dihitung dengan formula Jumlah informasi publik yang tersedia dibagi Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan (disebarluaskan) dikali 100%.

c) Meningkatkan Layanan Data dan Statistik Daerah

Indikator sasaran “Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah” adalah Persentase data statistik yang terintegrasi yang

dihitung dengan formula Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi dibagi Jumlah Bidang data dikali 100%.

d) Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Indikator sasaran “Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah” adalah Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah, yang dihitung dengan Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah dibagi Jumlah Total Perangkat Daerah dikali 100%.

### 3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### 4. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:
  - a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

- a) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan sub kegiatan:

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

- a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah



- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:

- a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### 5. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dicapai melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas administrasi, sarana dan prasarana perkantoran serta pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
2. Meningkatnya pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Meningkatkan Pengelolaan Komunikasi Publik Melalui Pengelolaan Media Publik dan Kemitraan Dengan Lembaga Komunikasi Sosial
4. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik
5. Meningkatnya pelayanan data dan statistik daerah
6. Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dan pengamanan informasi di Bidang Persandian

## Rencana Kerja Tahunan

No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu</b>	<b>Rp 4.932.809.738</b>
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah domain dan sub domain yang dikelola</b>	Rp 3.669.358.759
No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah nama domain pemerintah daerah yang terdaftar	Rp 100.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain dan subdomain yang dipantau	Rp 14.160.000
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang terhubung jaringan intra pemerintah daerah	Rp 3.655.098.759
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal</b>	<b>Rp 914.000.979</b>
No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah website/aplikasi yang dipantau	Rp 19.824.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	Rp 872.576.979
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen terkait manajemen/tata kelola SPBE	Rp210.800.000
		Jumlah peserta pertemuan forum TIK	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah peserta pertemuan terkait data dan informasi elektronik	Rp 10.800.000
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah website/aplikasi yang dikelola secara terpadu</b>	<b>Rp 349.450.000</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah website/aplikasi yang dikembangkan	Rp 303.400.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengguna SPBE yang dibina	Rp 46.050.000

No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi</b>	<b>Rp 308.282.000</b>
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data yang didiseminasikan</b>	<b>Rp 308.282.000</b>
No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral yang didiseminasikan	Rp 44.338.000
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang dibina	Rp 109.000.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang tersedia	Rp 34.944.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah SDM pengelola statistik sektoral sesuai kompetensi	<b>Rp -</b>
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah sarana dan prasarana statistik sektoral	Rp 120.000.000
No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
3	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat</b>	<b>Rp. 2.014.365.408</b>
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)

	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat</b>	<b>Rp 2.014.365.408</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penguatan kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Jumlah KIM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Rp 103.037.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Rp 131.062.580
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah saluran opini yang dipantau	Rp35.178.000
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah unsur pemangku kepentingan yang bermitra dengan pemerintah daerah	Rp428.399.813
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Rp 124.185.600
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten yang dipublikasikan	Rp 197.500.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media publik yang dikelola	Rp 506.750.000
	Layanan Hubungan Media	Jumlah berita yang dipublikasikan	Rp 600.000.000
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah laporan analisis isu terindikasi krisis	Rp 200.009.808



	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah partisipasi masyarakat dalam dialog interaktif, Jumlah komunitas yang bermitra dengan LPPL Radio Suara Lumajang	Rp385.920.000
<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</b>	<b>Rp 98.768.039</b>
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi radio</b>	<b>Rp 47.277.400</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah PD yang menggunakan sandi dalam komunikasi radio	Rp 47.277.400
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PD yang memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan</b>	<b>Rp 51.490.639</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PD yang memiliki jaring komunikasi sandi	Rp 51.490.639
<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>Rp 5.008.123.728</b>
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Rp 14.292.180</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	Rp 7.900.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	Rp 1.819.200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 864.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	Rp 1.495.200
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen evaluasi kinerja PD	Rp 2.213.580
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 2.607.614.620</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Rp2.543.280.820
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Rp 59.502.960
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp 2.313.600
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	Rp 2.517.240
	Penyusunan Laporan Keuangan Prognosis Realisasi Anggaran		Rp -
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 6.462.700</b>
No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Rp -
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan BMD	Rp 6.462.700
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)

	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>Rp 912.012.000</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah jenis pakaian dinas yang disediakan	Rp 45.100.000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	Rp 3.072.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN terfasilitasi pendidikan dan pelatihan	Rp 3.840.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan perundang undangan di bidang cukai (DBHCHT)	Rp 860.000.000
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>Rp 311.925.315</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	Rp 7.385.400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Rp 78.778.040
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	Rp 24.414.775

		Jumlah fasilitasi penggunaan yang disediakan	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan lainnya yang disediakan	Rp 2.102.100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Rp 2.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	Rp196.995.000
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</b>	<b>Rp 358.347.673</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Rp358.347.673
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>Rp 428.269.240</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	Rp 3.457.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Rp 178.200.240
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	Rp246.612.000
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>	<b>Rp 369.200.000</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Rp 128.600.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	Rp 6.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Rp 33.900.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor/bangunan lain yang dipelihara	Rp 200.000.000

## Rencana Kerja Tahunan (PAPBD)

No.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik</b>	<b>Rp 1.410.853.900</b>
		<b>Persentase Informasi yang dipublikasikan</b>	
No.	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi public</b>	<b>Rp 1.410.853.900</b>
		<b>Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi Publik Milik Pemkab</b>	
No.	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Rp 44.720.000
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 136.110.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Rp 31.038.500
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	Rp 36.395.000
	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Rp 108.000.000
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Rp 451.916.000



	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Rp117.580.000
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 239.160.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 245.934.400
<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
2	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.</b>	<b>Rp 2.287.537.450</b>
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah domain dan sub domain yang dikelola</b>	<b>Rp 1.494.921.450</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 100.000
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan	Rp 15.576.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Rp 1.479.245.450
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal</b>	<b>Rp 792.616.000</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 201.800.000
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Rp 464.916.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Rp 7.500.000
<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi</b>	<b>Rp 28.683.000</b>
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi</b>	<b>Rp 28.683.000</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 4.683.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Rp 24.000.000
<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
4	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah</b>	<b>Rp 7.213.500</b>
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi</b>	<b>Rp 7.213.500</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 7.213.500
<b>No.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>
5	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran</b>	<b>Rp 3.645.521.811</b>
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Rp 11.274.000</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.170.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 3.648.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp -
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp -
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.456.000
<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 2.735.006.536</b>
<b>No.</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.676.866.536

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 58.140.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp -
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp -
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Rp -</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp -
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp -
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>Rp 300.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp -
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp -
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Rp -

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 300.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD</b>	<b>Rp 295.086.370</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp 4.444.330
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rp 70.024.130
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp 23.833.910
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rp -
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 4.950.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 191.834.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pengadaan BMD</b>	Rp -
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Perizinan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Rp -

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>Rp 431.228.400</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6.528.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp 176.100.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp 248.600.400
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pemeliharaan BMD</b>	<b>Rp 172.626.505</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp 142.336.505
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Rp 7.190.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rp 23.100.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp -

## B. PERJANJIAN KINERJA

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang dipublikasikan	100%
		Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	100%
2.	Program Aplikasi Informatika	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	100%
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	80%
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100%
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%



### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan suatu alat pengukuran pertanggungjawaban atas suatu kewajiban, sedangkan Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu pengukuran pertanggungjawaban capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Akuntabilitas Kinerja atau biasa dikenal dengan istilah **LKJIP**.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang 2022 secara umum dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Sasaran disamping berfungsi sebagai sarana pengembangan strategi organisasi di waktu yang akan datang juga secara teknis dapat digunakan sebagai alat untuk menunjukkan performance dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam rangka mengendalikan fungsi-fungsi managerial secara menyeluruh.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

##### 1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian merupakan hasil dari suatu Penilaian yang sistematis dan didasarkan pada *Kelompok Indikator Kegiatan* yang berupa indikator masukan (**Input**), Indikator Keluaran (**Output**), Indikator Hasil (**Outcome**), Manfaat (**Benefit**), dan Dampak (**Impact**). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk Kuantitatif dan Kualitatif berdasarkan sasaran strategis

yang ingin dicapai yang sudah dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tersebut dilakukan agar lebih terukur dan mudah dievaluasi pada setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur dengan benar pencapaiannya. Analisis Capaian Kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja dengan tingkat capaian berdasarkan Sasaran Strategis yang telah ditargetkan secara menyeluruh. Capaian Kinerja diukur dengan mengukur capaian fisik pelaksanaan program dan kegiatan dengan akuntabilitas keuangan dari program dan kegiatan tersebut dalam mendukung ketercapaian indikator sasaran. Pengukuran tingkat capaian ditetapkan menggunakan skala pengukuran dengan nilai skala ordinal.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program dan kegiatan tersebut, berikut ini gambaran kategori capaian sasaran menggunakan nilai skala ordinal sebagaimana tabel di bawah ini :

NO. URUT	NILAI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	≤ 55%	Kurang Berhasil
2.	56% s/d 70%	Cukup Berhasil
3.	71% s/d 85%	Berhasil
4.	≥ 86%	Sangat Berhasil

## 2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Sedangkan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja merupakan Hasil Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Target Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja, baik indikator yang menjadi Indikator

Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Pendukung dari Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 digambarkan dengan Capaian Kinerja Sasaran sebagaimana komitmen kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disinggung pada Bab II di atas. Gambaran ketercapaian Indikator Kinerja dapat dijelaskan sebagaimana tahapan proses berikut :

**MISI 3 :**  
**“Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi.”**

**TUJUAN 1 :**  
**“Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).”**

**INDIKATOR 1 :**  
**“Indeks SPBE”**

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 yaitu :

**“Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)”**

Dengan target tujuan strategis yang yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan P-RPJMD Kabupaten dan P-Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR OR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	-	Indeks SPBE	Baik (2,60)	Baik (3,20)	Baik (2,60 - <3,50)	Baik (2,60 - <3,50)	Sangat Baik (3,50 - <4,20)

Berdasarkan hasil rumusan Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang tersebut di atas dapat dijabarkan lebih lanjut Tujuan dari Perangkat Daerah (PD) yang akan menjadi Sasaran Strategis dari Pemerintah Daerah. Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu;
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.
3. Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah.
4. Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Dari Sasaran Perangkat Daerah (PD) dirumuskan pula indikator Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu
2. Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir
3. Persentase data statistik yang terintegrasi
4. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

Capaian Kinerja dari Sasaran Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan Indikator Kinerja Sasaran ditinjau dari Indikator Sasaran Strategis yang ingin dicapai. Gambaran Capaian Kinerja tersebut antara lain sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

<b>Sasaran</b>	<b>Formula</b>	<b>Perhitungan</b>	<b>Capaian</b>
Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu.	$\frac{\text{Jumlah PD pengguna sistem elektronik yang terpadu}}{\text{Jumlah PD yang ada}} \times 100\%$	$\frac{46}{49} \times 100\% = 93,88\%$	93,88%
Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang tersedia}}{\text{Jumlah informasi publik yang harus didiseminasikan}} \times 100\%$	$\frac{1600}{1906} \times 100\% = 83,94\%$	83,94%
Persentase data statistik yang terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah bidang data yang sudah terintegrasi}}{\text{Jumlah Bidang data}} \times 100\%$	$\frac{30}{37} \times 100\% = 81,08\%$	81,08%
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Total Perangkat Daerah}} \times 100\%$	$\frac{23}{49} \times 100\% = 46,94\%$	46,94%

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>CAPAIAN KINERJA</b>	<b>PREDIKAT CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu.	90%	93,88%	<b>Sangat Berhasil</b>
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	88%	83,94%	<b>Berhasil</b>
Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	80%	81,08%	<b>Berhasil</b>
Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	95%	46,94%	<b>Kurang Berhasil</b>

Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis tersebut di atas dapat dicapai oleh Indikator sasaran Kinerja dengan rumusan dari Indikator tersebut melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten lumajang seperti pemantauan Opini melalui Group FB Laporan Lumajang, Peliputan dan Produksi Berita, Peningkatan kapasitas PPID Pembantu, Kerjasama Publikasi dengan Media Massa, Pembinaan KIM melalui Penyusunan Dokumen KIM Desa Bercerita, Dialog Interaktif di Radio Suara Lumajang, Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Administrasi Perkantoran secara Elektronik (NADINE), dan Pelaksanaan Pengadaan Jaringan Fiber Optik (FO).

Tingkat Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa secara umum capaian target pada tahun 2022 sudah mencapai target yang sudah mencapai target yang ditetapkan. Dari 4 (empat) indikator sebagian besar sudah mencapai target yang diharapkan pada Indikator yang mendukung misi ketiga, yaitu mewujudkan Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi,. Gambaran Realisasi Indikator Kinerja Strategis dapat disajikan melalui tabel berikut ini :

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	90%	93,88%	100%
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	88%	83,94%	95,39%

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	80%	81,08%	100%
Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	95%	46,94%	49,41%

Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis dapat dipenuhi oleh tercapainya program-program yang dilaksanakan. Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 diarahkan untuk pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar. Aspek ini dilaksanakan bersamaan dengan semakin mantapnya penyelenggaraan pelayanan publik. Aspek ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi terciptanya SDM berkualitas yang mampu berpartisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, pelaksanaan arah kebijakan pada tahun ini mencakup empat hal yaitu: (i) melaksanakan penyelenggaraan *good and clean governance* melalui pengembangan *e-government*; dan (ii) melaksanakan percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (iii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; dan (iv) melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas. Dalam upaya mewujudkan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran dari Sasaran Strategis tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran.

a) **Perbandingan Target dan realisasi indikator sasaran pada sasaran strategis ketiga**

SASARAN STRATEGIS	IND. KINERJA	PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021			PERBANDINGAN TARGET REALISASI CAPAIAN TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	80%	90,38%	TERCAPAI	90%	93,88%	TERCAPAI
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	85%	66,19%	TIDAK TERCAPAI	88%	83,94%	TIDAK TERCAPAI
Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	65%	N/A	N/A	80%	81,08%	TERCAPAI
Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	90%	N/A	N/A	95%	46,94%	TIDAK TERCAPAI



Hasil Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang beberapa indikator kinerja sasaran sudah tercapai, hal itu dapat ditunjukkan dengan Hasil Capaian Kinerja rata-rata pada tabel diatas. Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa belum secara keseluruhan realisasi capaian kinerja tahun 2022 memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dilihat capaian kinerja tahun 2022, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ini mengalami penurunan pada salah satu indikator. Secara umum rata-rata capaian kinerja pada indikator pertama yaitu “Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu” tahun 2022 yaitu dari 90,38% menjadi 93,88% hal ini menunjukkan mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 3,5% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Sedangkan rata-rata capaian kinerja pada indikator kedua yaitu “Persentase Badan Publik yang menerapkan standar layanan informasi publik” mengalami perubahan indikator menjadi “Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir” akibat adanya P-RPJMD dan P-Rensta PD pada awal tahun 2022. Capaian pada tahun 2022 naik sebesar 17,75% dibandingkan capaian tahun 2021 dimana capaian pada tahun 2021 sebesar 66,19 % sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 83,94%. Sedangkan untuk dua indikator lainnya yaitu “Persentase data statistik yang terintegrasi“ dan “Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah” merupakan indikator baru yang muncul akibat adanya P-RPJMD dan P-Rensta PD pada awal tahun 2022 sehingga capaiannya untuk tahun 2021 dan 2022 tidak bisa diperbandingkan nilainya.

Meningkatnya target capaian pada indikator sasaran “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)” selaras dengan target capaian pada RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Reformasi birokrasi ini dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk

mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan dan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, target capaian pada indikator sasaran “Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)” pada Rencana Strategis Kabupaten Lumajang sudah selaras dengan indikator sasaran pada RPJMN yaitu “Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE” dimana pada RPJMN ini dalam mencapai tujuannya perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, murah dan efisien. Agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan dan untuk mencapai tujuannya, perlu dilakukan Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi supaya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan bisa terwujud dengan baik.

Peningkatan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang bisa tercapai karena terlaksananya komitmen pemerintah untuk membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, demokratis, dan terpercaya. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah dengan menerapkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya penerapan *e-government*, pemerintah daerah dituntut untuk semakin cepat dalam penyaluran informasi pada Masyarakat. Dalam hal ini seluruh PD diuntut untuk selalu memberikan informasi terbaru karena apabila dilihat secara fakta, ada beberapa informasi yang tidak tersalurkan ke masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan capaian kinerja yang berimplikasi dengan peningkatan capaian sasaran strategis yaitu dengan diperlukan penyediaan anggaran yang cukup untuk menyediakan sarana dan prasarana TIK yang memadai dan memberikan insentif

bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Dukungan dari pimpinan juga sangat mempengaruhi peningkatan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program sehingga para pelaksana program kegiatan bisa merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022 dengan baik.

**a. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis PD (Renstra)**

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR 2023	CAPAIAN 2022	CAPAIAN	TINGKAT KEMAJUAN
	1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu.	100%	93,88%	93,88%	Akan tercapai
2	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	100%	83,94%	83,94%	Akan tercapai
3	Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Persentase data statistik yang terintegrasi	100%	81,08%	81,08%	Akan tercapai
4	Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	90%	46,94%	52,16%	Akan tercapai

Berdasarkan Tabel 3.6 menunjukkan tingkat kemajuan realisasi terhadap target akhir Renstra yaitu sebesar 93,88% untuk Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu dan 83,94 % untuk realisasi Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir. Pada Tabel tersebut juga menunjukkan perbandingan realisasi dengan target akhir Renstra bahwa capaian Persentase data statistik yang terintegrasi tahun 2022 sebesar 81,08 % sedangkan target akhir periode Renstra adalah 100% maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 81,08 %. Sedangkan untuk perbandingan realisasi dengan target akhir Renstra bahwa capaian Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah tahun 2022 sebesar 46,94 % sedangkan target akhir periode Renstra adalah 90 % maka terdapat tingkat kemajuan sebesar 52,16 %.

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Tabel T-C.23.

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

## Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan	Target Renstra Perangkat					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian Realisasi Anggaran Pada				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Peningkatan jumlah saluran komunikasi dan informasi	294	301	N/A	N/A	N/A	304	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Peningkatan jumlah web/aplikasi sub domain	31	50	N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	N/A	70%	80%	80%	90%	N/A	70%	80%	90,88%	93,88%	N/A	100%	100%	99%	91,40%
4	Persentase badan publik yang menerapkan standar layanan informasi publik	N/A	80%	83%	N/A	N/A	N/A	80%	83%	N/A	N/A	N/A	100%	83%	N/A	N/A
5	Persentase data statistik yang terintegrasi	N/A	50%	60%	65%	80%	N/A	27%	43%	100%	81,08%	N/A	N/A	74%	99,96%	99,88%
6	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	N/A	70%	70%	90%	95%	N/A	100%	100%	90%	46,94%	N/A	N/A	74%	60%	92,53%
7	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	N/A	80%	83%	85%	88%	N/A	40%	39%	66,19%	83,94%	N/A	N/A	N/A	98%	97,17%

**b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)			TINGKAT EFI SIENSI (%)	KET.
			PAGU PAK (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya Pelayanan pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.647.921.811	3.468.429.341	179.492.470	4,92%	
	Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.468.101.426	1.398.007.422	70.094.004	4,12%	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK	Program Aplikasi Informatika	808.292.000	723.285.233	85.006.767	12,91%	
	Meningkatkan Layanan Data dan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	28.683.000	28.650.000	33.000	-5,28%	
	Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	7.213.500	6.675.000	538.500	18,58%	

Hasil Capaian Pengukuran Efisiensi Anggaran dari Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran secara keseluruhan sudah mencapai efisiensi yang cukup baik. Berdasarkan Tabel diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian efisien yang cukup baik dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat Program yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Jumlah sumber daya manusia di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang tidak mengalami penambahan setiap tahunnya sedangkan banyak pegawai yang memasuki usia pensiun sementara disisi lainnya tidak ada penerimaan pegawai baru. Namun demikian dengan jumlah personil yang ada tetap dioptimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia juga dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

**c. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.**

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022 melaksanakan 14 kegiatan yang tercakup dalam 5 program yaitu:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik dengan kegiatan:

a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- Pelayanan Informasi Publik

- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- Manajemen Komunikasi Krisis
- Layanan Hubungan Media
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik

2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan kegiatan:

- a) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

- b) Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

3. Program Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

- a) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota:

Dengan Sub Kegiatan:

- Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/ Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

- b) Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota



Dengan Sub Kegiatan:

- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan kegiatan:

a) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Penyediaan Bahan/Material
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Dengan Sub Kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari beberapa indikator kinerja tersebut diatas dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan, kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran antara lain:

1. adanya penerapan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang terpadu dan terintegrasi SPBE.
2. adanya peningkatan komitmen penggunaan sistem elektronik/aplikasi berbagi pakai.
3. Tersedianya informasi publik oleh Perangkat Daerah secara berkelanjutan.
4. adanya peningkatan komitmen penerapan Satu Data Indonesia.
5. Meningkatnya komitmen persandian dan pengamanan informasi perangkat daerah.

Analisa Kendala yang mempengaruhi pencapaian sasaran antara lain:

1. Kurang patuhnya OPD dalam memperbaharui daftar informasi publik di website.
2. Kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengguna sistem elektronik.

3. Kurang optimalnya manajemen dan tata kelola data pada Perangkat Daerah.
4. Belum ditetapkan SOP penyelenggaraan persandian.
5. Pemkab Lumajang masih belum memiliki kebijakan daerah terkait penyelenggaraan SPBE.
6. Arsitektur dan peta rencana SPBE belum sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Penerapan Domain manajemen SPBE belum optimal sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Belum ada kebijakan daerah terkait penyelenggaraan SPBE.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan:

1. Peningkatan koordinasi antar OPD dan penyelenggaraan bimtek/sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik.
2. Mengusulkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM pengguna sistem elektronik.
3. Mengusulkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Perangkat Daerah terkait manajemen dan tata kelola data.
4. Menjalinkan kerjasama dengan BPS Lumajang selaku pembina data.
5. Meningkatkan koordinasi antar PD terkait penyelenggaraan persandian.

#### **d. Perbandingan target dan Realisasi masing-masing Program yang disajikan**

Seluruh program kegiatan diatas ditujukan untuk mencapai target dari 4 indikator sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan target yang sudah ditetapkan. Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2022 dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang seluruh indikator realisasinya mencapai target. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan didalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2022.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat factor penghambat di dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sehingga masih ada satu indikator yang tidak mencapai target. Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah kurang optimalnya manajemen dan tata kelola data pada Perangkat Daerah, keterbatasan kapasitas SDM pengguna sistem elektronik dan Belum tersusunnya tata kelola persandian dan pengamanan informasi sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk hambatan-hambatan yang dialami masing masing indikator Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir yaitu Kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam pembaruan daftar informasi publik. Selanjutnya hambatan pada indikator Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu yaitu karena Kurangnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengguna Sistem Elektronik. Selain itu, Untuk indicator sasaran Persentase data statistik yang terintegrasidikarenakan Kurang Optimalnya Manajemen Dan Tata Kelola Data Pada Perangkat Daerah. Dan yang terakhir pada indikator sasaran Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah dikarenakan Belum tersusunnya tata kelola persandian dan pengamanan informasi.

**e. Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022**

Pengumpulan Data dan Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan secara optimal pada tahun 2022. Selanjutnya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Capaian pada tahun 2022 secara berkala dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan seluruh bidang-bidang yang ada.

**Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022**

SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2022			Realisasi			Capaian		EFISIE NSI
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	100	%	112.153.500	90,57	%	111.531.500	91%	99,45%	-8,88%
		Persentase Informasi yang dipublikasikan	100	%	1.355.947.926	99	%	1.286.475.922	99%	94,88%	4,12%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PPID yang telah memperbarui informasi publik	53	PPID	112.153.500	48	PPID	111.531.500	91%	99,45%	-8,88%
		Jumlah Informasi melalui Media Komunikasi Publik Milik Pemkab	410	berita	1.355.947.926	410	berita	1.286.475.922	100%	94,88%	5,12%
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	3	dokumen	44.720.000	3	dokumen	44.712.000	100%	99,98%	0,02%
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	12	Dokumen	136.110.000	12	Dokumen	136.027.000	100%	99,94%	0,06%
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1	Dokumen	31.038.500	1	Dokumen	31.026.500	100%	99,96%	0,04%
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkat kapasitasnya	60	orang	36.395.000	60	orang	35.793.000	100%	98,35%	1,65%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2022			Realisasi			Capaian		EFISIE NSI
			K	Rp		K	Rp	K	Rp		
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	12	dokumen	108.000.000	12	dokumen	107.700.000	100%	99,72%	0,28%
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	23	layanan	451.916.000	23	layanan	415.896.000	100%	92,03%	7,97%
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	dokumen	117.580.000	12	dokumen	117.248.596	100%	99,72%	0,28%
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	dokumen	233.740.000	12	dokumen	226.484.000	100%	96,90%	3,10%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6	dokumen	308.601.926	6	dokumen	283.120.326	100%	91,74%	8,26%
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.</b>	90	%	2.287.537.450	93,88	%	2.090.744.113	104%	91,40%	12,91%
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah domain dan sub domain yang dikelola	1	Domain	1.494.921.450	1	Domain	1.383.089.880	100%	92,52%	7,48%
			264	Subdomain		264	Subdomain		100%		100,00%
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Domain	100.000	1	Domain	55.000	100%	55,00%	45,00%
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	96	dokumen	15.576.000	96	Domain	15.576.000	100%	100,00%	0,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2022		Realisasi		Capaian		EFISIE NSI		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	unit	1.479.245.450	1	unit	1.367.458.880	100%	92,44%	7,56%
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal</b>	1	Pusat Data	792.616.000	1	Pusat Data	707.654.233	100%	89,28%	10,72%
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	dokumen	201.800.000	1	dokumen	201.704.250	100%	99,95%	0,05%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	Pusat Data	464.916.000	1	Pusat Data	380.249.983	100%	81,79%	18,21%
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	45	website/aplikasi	118.400.000	57	website/aplikasi	118.200.000	127%	99,83%	26,84%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	80	Orang	7.500.000	369	Orang	7.500.000	461%	100%	361,25%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi</b>	80	%	28.683.000	81,08	%	28.650.000	100%	99,88%	-5,28%
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi</b>	28	Data	28.683.000	28	Data	28.650.000	100%	99,88%	0,12%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	12	dokumen	4.683.000	12	dokumen	4.650.000	100%	99,30%	0,70%
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	28	dokumen	24.000.000	28	dokumen	24.000.000	100%	100%	0,00%





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2022		Realisasi		Capaian		EFISIE NSI		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Laporan	3.456.000	24	Laporan	3.448.000	100%	99,77%	0,23%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>98</b>	%	<b>2.735.006.536</b>	<b>98</b>	%	<b>2.573.354.337</b>	<b>100%</b>	<b>94,09%</b>	<b>5,91%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan	2.676.866.536	25	Orang/bulan	2.515.259.337	100%	93,96%	6,04%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	58.140.000	12	dokumen	58.095.000	100%	99,92%	0,08%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	1	Fasilitasi	0	1	Fasilitasi	-	100%	0,00%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	laporan	0	6	laporan	-	100%	0%	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	jenis	0	3	jenis	-	100%	0%	100,00%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>98</b>	%	<b>0</b>	<b>98</b>	%	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100,00%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	0	2	Dokumen	-	100%	0%	100,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	-	12	Laporan	-	100%	0%	100,00%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2022			Realisasi			Capaian		EFISIE NSI
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>300.000</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>300.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	paket	0	2	paket	-	<b>100%</b>	<b>0%</b>	100,00 %
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	dokumen	0	12	dokumen	0	<b>100%</b>	<b>0%</b>	100,00 %
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	orang	0	3	orang	0	<b>100%</b>	<b>0%</b>	100,00 %
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	ASN	300.000	10	ASN	300.000	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0,00%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas Administrasi Umum PD</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>295.086.370</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>290.898.715</b>	<b>100%</b>	<b>98,58%</b>	<b>1,42%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	paket	4.444.330	10	paket	4.444.318	<b>100%</b>	<b>100%</b>	0,00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	70.024.130	4	paket	69.891.840	<b>100%</b>	<b>99,81%</b>	0,19%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	23.833.910	2	paket	23.829.460	<b>100%</b>	<b>99,98%</b>	0,02%
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	paket	0	1	paket	0	<b>100%</b>	<b>0%</b>	100,00 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Fasilitasi	4.950.000	1	Fasilitasi	4.916.066	<b>100%</b>	<b>99,31%</b>	0,69%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Fasilitasi	191.834.000	2	Fasilitasi	187.817.031	<b>100%</b>	<b>97,91%</b>	2,09%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase fasilitas pengadaan BMD</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00 %</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

SASARAN PROGRAM	Program/ Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	Target 2022			Realisasi			Capaian		EFISIE NSI
			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	unit	0	10	unit	0	100%	0,00%	100,00 %
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>433.628.400</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>422.610.977</b>	<b>100%</b>	<b>97,46%</b>	<b>2,54%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	laporan	6.528.000	2	laporan	6.525.000	100%	99,95%	0,05%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	178.500.000	12	laporan	175.359.750	100%	98,24%	1,76%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	248.600.400	12	laporan	240.726.227	100%	96,83%	3,17%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>172.626.505</b>	<b>98</b>	<b>%</b>	<b>170.292.312</b>	<b>100%</b>	<b>98,65%</b>	<b>1,35%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	unit	142.336.505	4	unit	140.002.312	100%	98,36%	1,64%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1	unit	7.190.000	1	unit	7.190.000	100%	100,00%	0,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	unit	23.100.000	3	unit	23.100.000	100%	100,00%	0,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	0	1	unit	0	100%	0,00%	100,00 %
<b>Capaian Rata-rata Program</b>									<b>86%</b>		
<b>Capaian Rata-rata Kegiatan</b>									<b>99%</b>		

Berdasarkan Tingkat Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan pada tabel diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa capaian rata-rata Program sebesar 86%. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi memiliki capaian yang rendah dikarenakan oleh beberapa faktor yakni karena Belum tersusunnya tata kelola persandian dan pengamanan informasi sehingga banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program tersebut.

Faktor utama penyebab dari kegagalan tersebut adalah Belum tersusunnya tata kelola persandian dan pengamanan informasi dan Belum ditetapkannya SOP penyelenggaraan persandian sehingga banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Program tersebut. Pengumpulan data kinerja telah didukung dengan penetapan mekanisme/SOP namun belum dilaksanakan secara optimal. Monitoring atas capaian kinerja sudah dilakukan dengan menyertakan data pengukuran kinerja dan dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun anggaran 2022 yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang.

### **c) Akuntabilitas Kinerja Lainnya**

Pada bagian ini diuraikan inovasi dan Prestasi yang telah dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai beberapa inovasi yaitu:

#### **Inovasi :**

##### **1. LAPOR LUMAJANG ON AIR**

Setelah sukses menggunakan saluran laporan atau keluhan warga melalui Grup Facebook Lapor Lumajang, kini Dinas Kominfo akan merilis satu inovasi lagi yang berkaitan dengan penyerapan opini dan aspirasi publik. Inovasi baru ini bernama Lapor Lumajang On Air. Nama inovasi ini terbentuk dari gabungan dua frasa yaitu frasa Lapor Lumajang dan frasa On Air. Frasa Lapor Lumajang merujuk kepada saluran laporan yang sudah dimiliki sebelumnya yang menggunakan platform Facebook Group. Dalam grup ini warga melapor dengan cara menuliskan laporannya di dinding grup Lapor Lumajang untuk kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. Frasa On Air merujuk kepada kegiatan siaran di udara melalui

stasiun radio yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal ini Dinas Kominfo yaitu LPPL RSL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Lumajang). Sebagai radio yang melakukan siaran setiap hari, RSL sangat mungkin untuk menyerap opini publik dalam bentuk apapun misalnya laporan atau keluhan.

LAPOR LUMAJANG ON AIR merupakan gabungan dari kedua fasilitas pelaporan publik ini. Untuk merealisasikan program ini perlu ada kesepakatan dari dua bidang yang ada di Dinas Kominfo yaitu Bidang Informasi Publik (BIP) dan Bidang Komunikasi Publik (BKP). Setiap laporan yang masuk dalam FB Grup Lapor Lumajang akan menjadi *feed* (umpan) bagi penyiar radio untuk dibacakan dan diperdengarkan kepada pemirsa RSL. Bila memungkinkan, penyiar radio akan langsung menghubungi pejabat yang berwenang untuk memberikan tanggapan terhadap laporan tersebut. Semua rekaman tanggapan akan disimpan dan di-*publish* di website [www.laporlumajang.com](http://www.laporlumajang.com) untuk dibaca masyarakat. LAPOR LUMAJANG ON AIR bertujuan untuk mempercepat proses tanggapan dari sebuah laporan agar masyarakat pelapor segera mendapatkan solusi atas suatu permasalahan. Selain itu, jangkauan dari laporan ini akan menjadi lebih luas karena segmentasi pendengar RSL bisa berbeda dengan segmentasi pembaca FB Grup Lapor Lumajang

## **2. ODOM (ONE DAY ONE NEWS AND MORE)**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang mempunyai inovasi untuk meningkatkan produksi pemberitaan terkait program dan kebijakan pemerintah kepada publik, pelayanan publik dan partisipasi publik dalam membangun daerah yang dipublikasikan melalui website resmi Pemkab Lumajang [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id) dan pada website pemerintah pusat di Rubrik Nusantara [www.infopublik.id](http://www.infopublik.id). Upaya tersebut dilakukan, agar dapat mengomunikasikan program atau kebijakan publik secara cepat, tepat, akurat dan relevan agar mudah dipahami, serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan.

## **3. SILANG (INFORMASI KEHILANGAN)**

Radio Suara Lumajang sebagai LPPL menangkap kebutuhan masyarakat atas pelayanan publikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah kebutuhan publikasi berita kehilangan di media massa

(radio) sebagai salah satu syarat untuk pengurusan dokumen pribadi yang hilang. Hasil dari Program Pelayanan Informasi Berita Kehilangan ada 2 manfaat, yaitu masyarakat dengan mudah bisa menyebarkan informasi kehilangannya ke masyarakat luas dengan harapan dokumen yang hilang bisa ditemukan, manfaat yang kedua adalah masyarakat bisa memperoleh dokumen bukti siar di radio sebagai syarat untuk mengurus atau membuat dokumen pribadi yang hilang.

**a. Prestasi yang dicapai :**

1. PPID Kabupaten Lumajang

PPID Kabupaten Lumajang memperoleh penghargaan KI Awards. KI Awards merupakan penghargaan atas keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada badan publik di wilayah Provinsi Jatim. Kegiatan tersebut sebagai rangkaian puncak dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jatim, terkait kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik tahun 2022, Pemkab Lumajang mendapat nilai 98,77, dan menempati urutan kedua setelah Kota Madiun yang menjadi terbaik dengan nilai 99,25.





**b. Perbandingan-perbandingan secara lengkap atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan standar nasional, provinsi, dan atau Kabupaten/Kota lainnya Dibandingkan Dengan Kabupaten/ Kota Lain**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Kabupaten Lumajang berada di peringkat ke-16 dari 36 daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan skor indeks 2,60 (predikat: baik). Peringkat tersebut berdasarkan kinerja penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022. Adapun urutan peringkat daerah kota secara nasional dapat dilihat pada Tabel berikut.

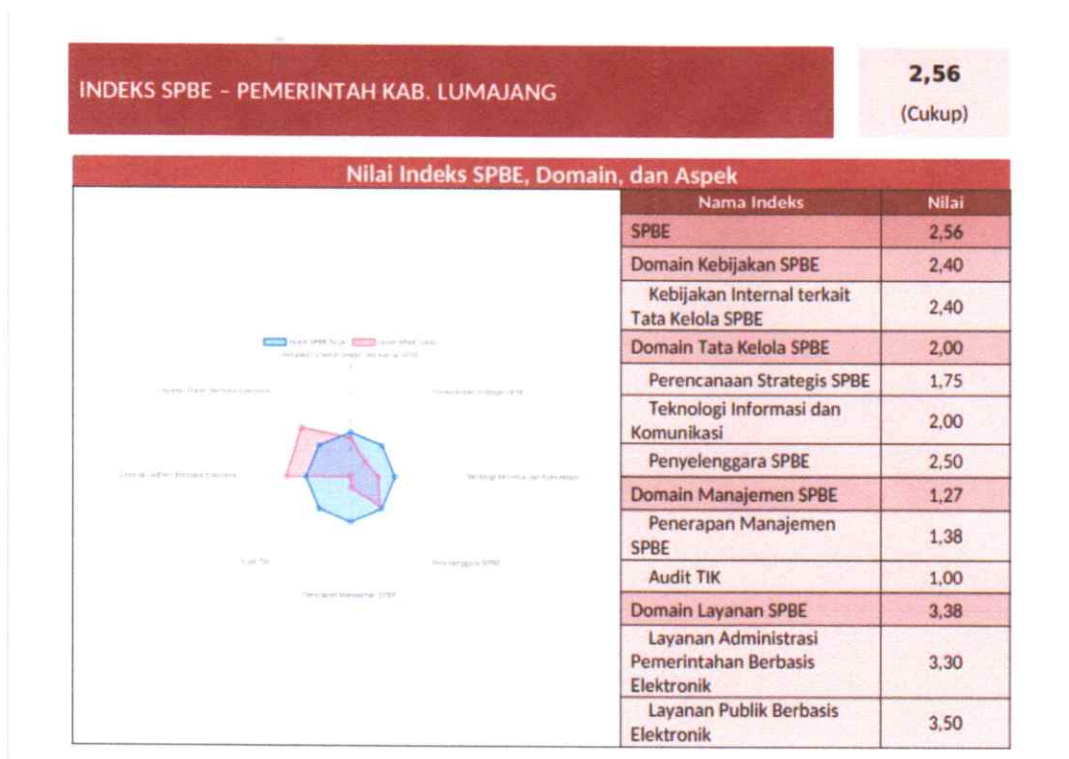
**Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3,30	Baik
2	Pemerintah Kab. Gresik	3,27	Baik
3	Pemerintah Kab. Mojokerto	2,73	Baik
4	Pemerintah Kab. Sidoarjo	2,29	Cukup
5	Pemerintah Kab. Jombang	2,96	Baik
6	Pemerintah Kab. Sampang	2,55	Cukup
7	Pemerintah Kab. Pamekasan	2,10	Cukup
8	Pemerintah Kab. Sumenep	2,05	Cukup
9	Pemerintah Kab. Bangkalan	1,89	Cukup
10	Pemerintah Kab. Bondowoso	2,23	Cukup
11	Pemerintah Kab. Situbondo	3,19	Baik
12	Pemerintah Kab. Jember	1,99	Cukup
13	Pemerintah Kab. Malang	2,22	Cukup
14	Pemerintah Kab. Pasuruan	2,04	Cukup
15	Pemerintah Kab. Probolinggo	2,42	Cukup
16	Pemerintah Kab. Lumajang	2,60	Baik
17	Pemerintah Kab. Kediri	2,61	Baik
18	Pemerintah Kab. Tulungagung	2,38	Cukup
19	Pemerintah Kab. Nganjuk	2,18	Cukup
20	Pemerintah Kab. Trenggalek	2,55	Cukup
21	Pemerintah Kab. Blitar	2,61	Baik
22	Pemerintah Kab. Magetan	2,27	Cukup
23	Pemerintah Kab. Ponorogo	2,32	Cukup
24	Pemerintah Kab. Pacitan	2,31	Cukup
25	Pemerintah Kab. Bojonegoro	2,65	Baik
26	Pemerintah Kab. Tuban	2,32	Cukup
27	Pemerintah Kab. Lamongan	2,82	Baik
28	Pemerintah Kota Surabaya	3,69	Sangat Baik
29	Pemerintah Kota Mojokerto	3,32	Baik

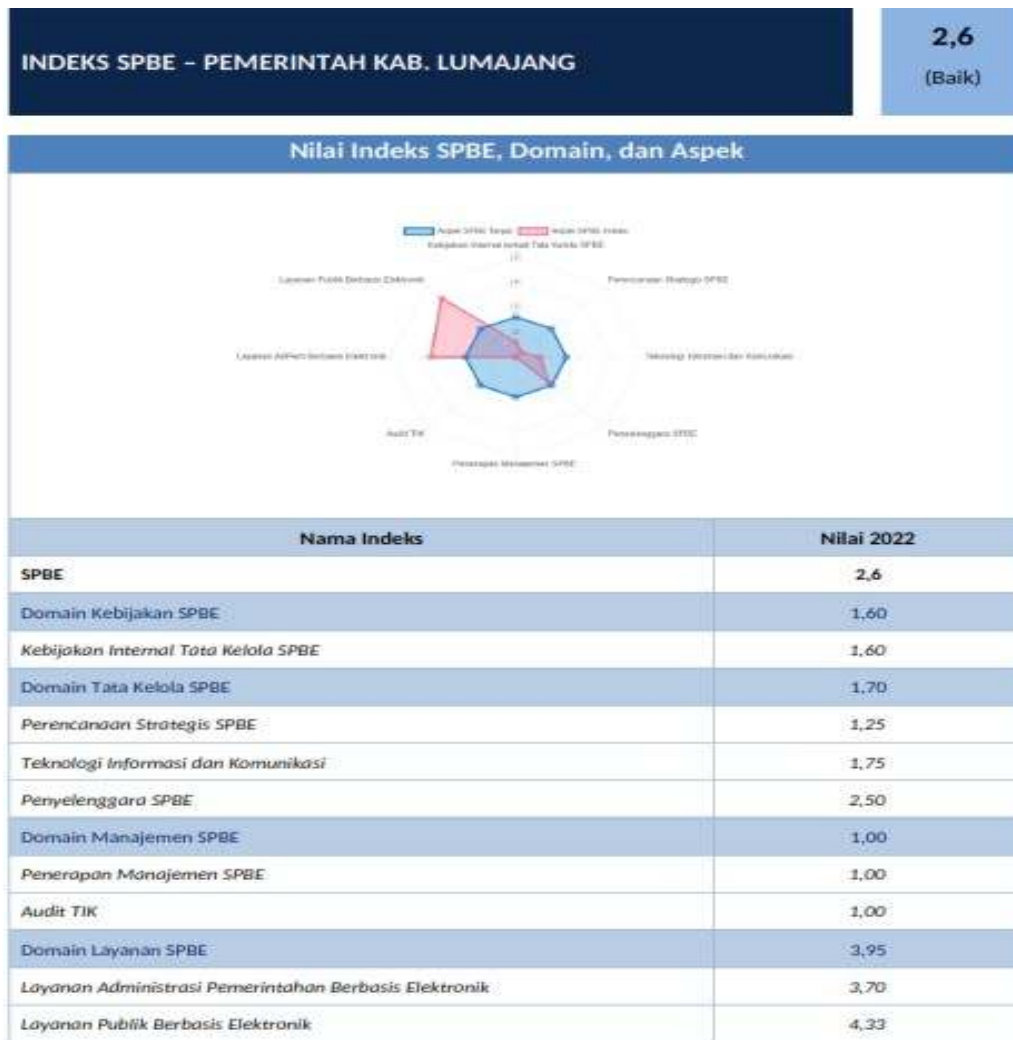


No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
30	Pemerintah Kota Malang	2,60	Baik
31	Pemerintah Kota Pasuruan	2,66	Baik
32	Pemerintah Kota Probolinggo	1,97	Cukup
33	Pemerintah Kota Blitar	2,81	Baik
34	Pemerintah Kota Kediri	2,96	Baik
35	Pemerintah Kota Madiun	2,86	Baik
36	Pemerintah Kota Batu	2,41	Cukup

Indeks SPBE yang semula pada tahun 2021 mendapat Predikat cukup dengan Nilai 2,56 (gambar 1) dan Pada Tahun 2022 nilainya naik menjadi predikat baik dengan nilai 2,60 (gambar 2).



Gambar 2. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022



Gambar 3. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun 2022

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2022 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Jumlah dana APBD serta Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**

### **Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	Rp. 1.171.631.924,00	Rp. 1.148.118.032,00	97,99

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
2	Tunjangan keluarga	Rp. 137.147.081,00	Rp. 127.154.272,00	92,71
3	Tunjangan jabatan	Rp. 147.425.000,00	Rp. 142.815.000,00	96,87
4	Tunjangan fungsional umum	Rp. 24.015.000,00	Rp. 23.880.000,00	99,44
6	Tunjangan beras	Rp. 88.417.032,00	Rp. 85.526.760,00	96,73
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	Rp. 1.245.408,00	Rp. 1.190.787,00	95,61
8	Pembulatan gaji	Rp. 20.981,00	Rp. 18.268,00	87,07
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp. 2.902.656,00	Rp. 2.755.247,00	94,92
10	Iuran jaminan kematian ASN	Rp. 7.489.968,00	Rp. 6.729.036,00	89,84
11	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	Rp. 1.096.571.486,00	Rp. 977.071.935,00	89,10
	<b>JUMLAH BELANJA PEGAWAI</b>	Rp. 2.676.866.536,00	Rp. 2.515.259.337,00	<b>93,96</b>

**BELANJA LANGSUNG**

<b>BIDANG</b>	<b>: SEKRETARIAT</b>			
<b>Program</b>	<b>: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>11.274.000,-</b>	<b>10.973.000,-</b>		<i>Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa</i>
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<b>4.170.000,00</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>99,88</b>	
Belanja Barang & Jasa	4.170.000,00	4.165.000,00	99,88	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 520.000,00
				- Belanja Lembur Rp 3.645.000,00
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<b>3.648.000,00</b>	<b>3.360.000,00</b>	<b>92,11</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	3.648.000,00	3.360.000,00	92,11	<u>- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</u> Rp 0,00
				- Belanja Lembur Rp 3.360.000,00
<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<b>3.456.000,00</b>	<b>3.448.000,00</b>	<b>99,77</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Belanja Barang & Jasa	3.456.000,00	3.448.000,00	99,77	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 190.000,00
				- Belanja Lembur Rp 3.258.000,00
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.735.006.536,-</b>	<b>2.573.354.337,-</b>	<b>94</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.676.866.536,00</b>	<b>2.515.259.337,00</b>	<b>93,96</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Pegawai	2.676.866.536,00	2.515.259.337,00	93,96	- <u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> <u>Rp 1.148.118.032,00</u>
				- <u>Belanja Tunjangan Keluarga PNS</u> <u>Rp 127.154.272,00</u>
				- <u>Belanja Tunjangan Jabatan PNS</u> <u>Rp 142.815.000,00</u>
				- <u>Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS</u> <u>Rp 23.880.000,00</u>
				- <u>Belanja Tunjangan Beras PNS</u> <u>Rp 85.526.760,00</u>
				- <u>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS</u> <u>Rp 1.190.787,00</u>
				- <u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				Rp 18.268,00
				-Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 2.755.247,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 6.729.036,00
				- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 977.071.935,00
<b>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	<b>58.140.000,00</b>	<b>58.095.000,00</b>	<b>99,92</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Pegawai	51.612.000,00	51.577.000,00	99,93	- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 33.768.000,00
				- Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 17.809.000,00
Belanja Barang & Jasa	6.528.000,00	6.518.000,00	99,85	- Belanja Lembur Rp 6.518.000,00
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	300.000,00	300.000,00		
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	300.000,00	300.000,00	100	
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>295.086.370,-</b>	<b>290.898.715,-</b>		
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i></b>	<b>4.444.330,00</b>	<b>4.444.318,00</b>	<b>100,00</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	4.444.330,00	4.444.318,00	100,00	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 4.444.318,00
<b><i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i></b>	<b>70.024.130,00</b>	<b>69.891.840,00</b>	<b>99,81</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	70.024.130,00	69.891.840,00	99,81	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 8.771.840,00
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 61.120.000,00
<b><i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i></b>	<b>23.833.910,00</b>	<b>23.829.460,00</b>	<b>99,98</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	23.833.910,00	23.829.460,00	99,98	- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 23.829.460,00
<b><i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i></b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.916.066,00</b>	<b>99,31</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	4.950.000,00	4.916.066,00	99,31	- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp. 4.916.066,00
<b><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i></b>	<b>191.834.000,00</b>	<b>187.817.031,00</b>	<b>97,91</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	191.834.000,00	187.817.031,00	97,91	- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 176.792.031,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 11.025.000,00
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	0	0	0	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i></b>	<b>616.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>97,40</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp.0
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>433.628.400,-</b>	<b>422.610.977,-</b>		
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i></b>	<b>6.528.000,00</b>	<b>6.525.000,00</b>	<b>99,95</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	6.528.000,00	6.525.000,00	99,95	- <u>Belanja Paket/Pengiriman</u> Rp 0,00
				- <u>Belanja Lembur</u> Rp 6.525.000,00
<b><i>Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i></b>	<b>178.500.000,00</b>	<b>175.359.750,00</b>	<b>98,24</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	178.500.000,00	175.359.750,00	98,24	- Belanja Tagihan Telepon Rp. 13.463.890,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				- Belanja Tagihan Air Rp. 461.400,00
				- Belanja Tagihan Listrik Rp. 161.434.460,00
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>248.600.400,00</b>	<b>240.726.227,00</b>	<b>96,83</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	248.600.400,00	240.726.227,00	96,83	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 148.800.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp. 18.000.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Supir Rp. 18.000.000,00
				- Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp. 600.000,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 50.335.120,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 2.218.271,00
				- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 2.772.836,00
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>172.626.505,-</b>	<b>170.292.312,-</b>	<b>99,00</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>	<b>142.336.505,00</b>	<b>140.002.312,00</b>	<b>98,36</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	142.336.505,00	140.002.312,00	98,36	- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 85.929.812,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 52.172.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 1.900.500,00
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>23.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<u>Realisasi digunakan untuk:</u>
Belanja Barang & Jasa	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00	- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.200.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 15.400.000,00
				Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp. 6.500.000,00

## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

<b>PROGRAM</b>	<b>: INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i></b>	<b>1.468.101.426,00</b>	<b>1.398.007.422,00</b>	<b>95,23</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Monitoring Opini dan Aspirasi Publik</i></b>	<b>44.720.000,00</b>	<b>44.712.000,00</b>	<b>99,98</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	44.720.000,00	44.712.000,00	99,98	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 42.000.000,00
				- Belanja Lembur Rp 2.712.000,00
<b><i>Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah</i></b>	<b>136.110.000,00</b>	<b>136.027.000,00</b>	<b>99,94</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	136.110.000,00	136.027.000,00	99,94	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 106.800.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 3.327.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 25.900.000,00
<b><i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</i></b>	<b>233.740.000,00</b>	<b>226.484.000,00</b>	<b>96,90</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	233.740.000,00	226.484.000,00	96,90	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 188.400.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 3.654.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 34.430.000,00
<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>308.601.926,00</b>	<b>283.120.326,00</b>	<b>91,74</b>	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	308.601.926,00	283.120.326,00	91,74	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 35.821.800,00
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp 14.792.526,00
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.350.000,00
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 1.400.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 62.400.000,00
				- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp 99.750.000,00
				- Belanja Lembur Rp 18.781.000,00
				- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				Rp. 2.000.000,00
				- Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp 3.000.000,00
				- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 0,00 Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp 18.000.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 25.825.000,00
<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>31.038.500,00</b>	<b>31.026.500,00</b>	<b>99,96</b>	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	31.038.500,00	31.026.500,00	99,96	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 1.028.500,00
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 4.200.000,00
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 1.200.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 20.400.000,00
				- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 450.000,00
				- Belanja Lembur Rp 3.748.000,00
<b>Layanan Hubungan Media</b>	<b>451.916.000,00</b>	<b>415.896.000,00</b>	<b>92,03</b>	Terdiri dari belanja barang dan jasa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

- Belanja Pegawai	2.154.000,00	2.154.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 2.154.000,00
- Belanja Barang & Jasa	449.762.000,00	413.742.000,00	91,99	- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 40.800.000,00
				- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan Rp 372.000.000,00
				- Belanja Lembur Rp 942.000,00
<b>Manajemen Komunikasi Krisis</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>107.700.000,00</b>	<b>99,72</b>	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	108.000.000,00	107.700.000,00	99,72	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 18.000.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 89.700.000,00
<b>Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik</b>	<b>36.395.000,00</b>	<b>35.793.000,00</b>	<b>98,35</b>	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	<b>100,00</b>	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 900.000,00
- Belanja Barang dan Jasa	35.495.000,00	34.893.000,00	98,30	Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				Rp. 1.575.000,00
				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 3.500.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 21.600.000,00
				- Belanja Lembur Rp. 1.768.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 4.950.000,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 1.500.000,00
<b>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</b>	<b>117.580.000,00</b>	<b>117.248.596,00</b>	<b>99,72</b>	Terdiri dari belanja barang dan jasa
- Belanja Barang & Jasa	117.580.000,00	117.248.596,00	99,72	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 6.334.500,00
				- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp. 4.940.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 63.600.000,00
				- Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp 18.000.000,00
				- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 20.160.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 4.214.096,00
<b>PROGRAM</b>	<b>: APLIKASI INFORMATIKA</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/ Wujud Kegiatan</b>
<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<b>1.494.921.450,00</b>	<b>1.383.089.880,00</b>	<b>93</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<i>Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</i>	<b>100.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55,00</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	100.000,00	55.000,00	55,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 55.000,00
<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<b>15.576.000,00</b>	<b>15.576.000,00</b>	<b>100,00</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	15.576.000,00	15.576.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Lembur Rp. 15.576.000,00



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

<b>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	<b>1.479.245.450,00</b>	<b>1.367.458.880,00</b>	<b>92,44</b>	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 291.830.000,00
				- Belanja Modal Peralatan Jaringan Rp 291.830.000,00
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/ Wujud Kegiatan</b>
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>792.616.000,00</b>	<b>707.654.233,00</b>		
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b><i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i></b>	<b><i>464.916.000,00</i></b>	<b><i>380.249.983,00</i></b>	<b><i>81,79</i></b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Pegawai	5.028.000,00	5.028.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 5.028.000,00
- Belanja Barang & Jasa	459.888.000,00	375.221.983,00	81,59	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 44.400.000,00
				- Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp 321.136.825,00
				- Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp 9.685.158,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.500.000,00
<b>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>118.400.000,00</b>	<b>118.200.000,00</b>	<b>99,83</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	118.400.000,00	118.200.000,00	99,83	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp 68.400.000,00
				- Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika Rp 49.800.000,00
<b>PROGRAM</b>	<b>: PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/ Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.683.000,00</b>	<b>28.650.000,00</b>	<b>99%</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</b>	<b>4.683.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>99,30</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	4.683.000,00	4.650.000,00	99,30	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 330.000,00
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 4.320.000,00
<b>Membangun Metadata Statistik</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 24.000.000,00
<b>Program</b>	<b>: PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			
<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Hasil/ Wujud Kegiatan</b>
<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>7.213.500,00</b>	<b>6.675.000</b>	<b>93%</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>		<b>Hasil/Wujud Kegiatan</b>
<b>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>	<b>7.213.500,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	<b>92,53</b>	<i>Terdiri dari belanja barang dan jasa</i>
- Belanja Barang & Jasa	7.213.500,00	6.675.000,00	92,53	<u>Realisasi Digunakan untuk:</u>
				- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 350.000,00
				- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.925.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

				- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 2.500.000,00
				- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp 150.000,00
				- Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp 0,00
				- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp 750.000,00

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, realisasi anggaran mencapai Rp. 6.992.505.876,00 atau 93,99 % dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.439.457.187,00 ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efektif dan efisien. Faktor utama penyebab beberapa permasalahan dalam merealisasikan anggaran adalah terjadinya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan. Selanjutnya Faktor *Refocusing* anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkaibat terhadap upaya pencapaian kinerja Program.

### **C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Hasil Penilaian Capaian Kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat heterogenitas masyarakatnya.
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah *blank spot* teknologi informasi komunikasi (TIK) dan *Blank Spot* pancaran sinyal radio.
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi (gaptek).
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika.
5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya.
6. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika
7. *Refocusing*/ Efisiensi anggaran karena kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga banyak berpengaruh terhadap anggaran yang tersedia dan berkibat terhadap upaya pencapaian kinerja.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di update baik melalui media cetak maupun media elektronik dan website.
2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa Pengembangan Jaringan Telekomunikasi *Fiber Optik* dan hotspot di wilayah publik (lingkup Kota) serta sekitar kantor Kecamatan dan Desa.
3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Lumajang dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio, Tabloid, dan website).
4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pegawai di PD.
5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/ pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan.
7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
8. Menyediakan ketersediaan kebutuhan data yang mutakhir yang bisa diakses oleh Masyarakat.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja Tahun 2022 dapat disimpulkan dengan baik, walaupun demikian dengan mencermati hasil evaluasi yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 ternyata masih banyak kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, oleh karena itu penyempurnaan strategi di masa yang akan datang perlu dilaksanakan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang Tahun 2022 ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/ evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya. Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

Lumajang, 17 Januari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LUMAJANG



**Ir. PAIMAN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19670606 199202 1 001**

# **LAMPIRAN DATA PENDUKUNG**



Lampiran 1 : Data Pendukung atas sasaran meningkatnya Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang terpadu.

**DATA PD PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK TERPADU**  
**JUMLAH PD PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK TERPADU**  
**Jumlah : 46 PD**

NO	PD	Sistem Elektronik
1	Inspektorat Daerah	Website ( <a href="http://inspektorat.lumajangkab.go.id">inspektorat.lumajangkab.go.id</a> )
2	Sekretariat Daerah	<a href="http://jdih.lumajangkab.go.id">jdih.lumajangkab.go.id</a> <a href="http://sakup.lumajangkab.go.id">sakip.lumajangkab.go.id</a>
3	Badan Kepegawaian Daerah	Website BKD ( <a href="http://bkd.lumajangkab.go.id">bkd.lumajangkab.go.id</a> ) <a href="http://simak.lumajangkab.go.id">simak.lumajangkab.go.id</a>
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<a href="http://bakesbangpol.lumajangkab.go.id">bakesbangpol.lumajangkab.go.id</a>
5	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	e-BPHTB ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bphtb/">https://bprd.lumajangkab.go.id/bphtb/</a> )
		e-SPTPD ( <a href="http://bprd.lumajangkab.go.id:2020/">http://bprd.lumajangkab.go.id:2020/</a> )
		e-Pajak Pasir ( <a href="http://bprd.lumajangkab.go.id:3030/e-pasir/">http://bprd.lumajangkab.go.id:3030/e-pasir/</a> )
		e-Reklame ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pajakreklame/">https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pajakreklame/</a> )
		Cek Pembayaran Baku Desa ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pbb-p2/web/Cek_op/cekdesa.php">https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pbb-p2/web/Cek_op/cekdesa.php</a> )
		e-PBB ( <a href="https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pbb-p2/web/Cek_op/index.php">https://bprd.lumajangkab.go.id/bprd/pbb-p2/web/Cek_op/index.php</a> )
6		
6	Badan Pengelola Keuangan Daerah	<a href="http://bpkd.lumajangkab.go.id">bpkd.lumajangkab.go.id</a>
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<a href="http://bappeda.lumajangkab.go.id">bappeda.lumajangkab.go.id</a>
		SIMTARU
8	Diskominfo	<a href="http://diskominfo.lumajangkab.go.id">diskominfo.lumajangkab.go.id</a>
		Website : <a href="http://lumajangkab.go.id">lumajangkab.go.id</a>
		<a href="http://pengaduan.lumajangkab.go.id">pengaduan.lumajangkab.go.id</a>
		Portal Berita
		<a href="http://e-gallery.lumajang.go.id">e-gallery.lumajang.go.id</a>
		<a href="http://simatedsos.lumajang.go.id">simatedsos.lumajang.go.id</a>
		PPID
		<a href="http://data.lumajangkab.go.id">data.lumajangkab.go.id</a>
		MRTG
		SMS Gateway
		Email menggunakan zimbra: <a href="mailto:mail.lumajangkab.go.id">mail.lumajangkab.go.id</a>
		Website Diskominfo ( <a href="http://diskominfo.lumajangkab.go.id">diskominfo.lumajangkab.go.id</a> )
<a href="http://sakip.lumajangkab.go.id">sakip.lumajangkab.go.id</a>		
<a href="http://e-office.lumajangkab.go.id">e-office.lumajangkab.go.id</a>		
9	Dispar	<a href="http://disparbud.lumajangkab.go.id">disparbud.lumajangkab.go.id</a>
10	Disnaker	<a href="http://disnaker.lumajangkab.go.id">disnaker.lumajangkab.go.id</a>
11	Dispendukcapil	<a href="http://dispenduk.lumajangkab.go.id">dispenduk.lumajangkab.go.id</a>
12	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<a href="http://dinsos.lumajangkab.go.id">dinsos.lumajangkab.go.id</a>
13	DPKP	<a href="http://dpkp.lumajangkab.go.id">dpkp.lumajangkab.go.id</a>
14	Dispora	<a href="http://dispora.lumajangkab.go.id">dispora.lumajangkab.go.id</a>

15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dinkes.lumajangkab.go.id
16	DPMPTSP	dpmptsp.lumajangkab.go.id
17	Satpol PP	satpolpp.lumajangkab.go.id
18	DPMD	dpmdesa.lumajangkab.go.id
		SID (Sistem Informasi Desa)
19	Dishub	dishub.lumajangkab.go.id
		flaj.lumajangkab.go.id
20	Dinas Perikanan	disikan.lumajangkab.go.id
21	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	dinkopum.lumajangkab.go.id
22	Disarpus	disarpus.lumajangkab.go.id
23	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.lumajangkab.go.id
24	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	pertanian.lumajangkab.go.id
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	dputr.lumajangkab.go.id
26	Website Kec. Candipuro	candipuro.lumajangkab.go.id
27	Website Kec. Gucialit	gucialit.lumajangkab.go.id
28	Website Kec. Jatiroto	jatiroto.lumajangkab.go.id
29	Website Kec. Kedungjajang	kedungjajang.lumajangkab.go.id
30	Website Kec. Klakah	klakah.lumajangkab.go.id
31	Website Kec. Kunir	kunir.lumajangkab.go.id
32	Website Kec. Lumajang	lumajang.lumajangkab.go.id
33	Website Kec. Padang	padang.lumajangkab.go.id
34	Website Kec. Pasirian	pasirian.lumajangkab.go.id
35	Website Kec. Pasrujambe	pasrujambe.lumajangkab.go.id
36	Website Kec. Pronojiwo	pronojiwo.lumajangkab.go.id
37	Website Kec. Randuagung	randuagung.lumajangkab.go.id
38	Website Kec. Ranuyoso	ranuyoso.lumajangkab.go.id
39	Website Kec. Rowokangkung	rowokangkung.lumajangkab.go.id
40	Website Kec. Senduro	senduro.lumajangkab.go.id
41	Website Kec. Sukodoono	sukodono.lumajangkab.go.id
42	Website Kec. Sumbersuko	sumpersuko.lumajangkab.go.id
43	Website Kec. Tekung	tekung.lumajangkab.go.id
44	Website Kec. Tempeh	tempeh.lumajangkab.go.id
45	Website Kec. Tempursari	tempursari.lumajangkab.go.id
46	Website Kec. Yosowilangun	yosowilangun.lumajangkab.go.id

Lampiran 2 : Data Pendukung atas sasaran Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik.

No.	Daftar Informasi Publik Yang Tersedia Tahun 2022
1	Jumlah SDM OPD
2	Layanan/SOP layanan OPD
3	Profil pimpinan OPD
4	LKJ Dinas 1 tahun OPD
5	LRA 1 tahun OPD
6	SK PPID OPD
7	Laporan Tahunan PPID OPD
8	LKJ 4 tahun sebelumnya OPD
9	Renstra OPD
10	Rekap pengaduan OPD
11	LKJ I OPD
12	DPA 1 OPD
13	RKA 1 OPD
14	LRA 1 OPD
15	CALK OPD
16	Laporan IKM Tw I OPD
17	LKJ 2 OPD
18	Peraturan OPD
19	Neraca OPD
20	Aset Investasi OPD
21	LRA 2 OPD
22	Laporan IKM Tw 2 OPD
23	Berita Infrastruktur
24	Berita Olahraga
25	Berita Keagamaan
26	Berita Pemerintahan
27	Berita Kebencanaan
28	Berita Ekonomi dan Sosial
29	Berita Politik dan Hukum
30	Berita Pertambangan
31	Berita Pemberdayaan
32	Berita Peternakan
33	Berita Lingkungan Hidup
34	Berita Produk UMKM
35	Berita Kuliner
36	Berita Komoditas
37	Berita Pariwisata
38	Berita Keanekaragaman Hayati
39	Berita Seni
40	Berita Budaya
41	Berita Perizinan
42	Berita Pertanian
43	Berita Keuangan
44	Berita Perdagangan
45	Berita Pendidikan
46	Berita Ketenagakerjaan
47	Berita Kependudukan
48	Berita Kesehatan

**REKAPITULASI UPDATE INFORMASI LAYANAN PUBLIK SECARA BERKALA TAHUN  
2022**

No	PD	Informasi Berkala	Informasi Serta Merta	Informasi Setiap Saat
1	Sekretariat DPRD	0	0	0
2	Inspektorat	18	0	0
3	BKD	14	0	0
4	Bakesbangpol	1	1	1
5	BPRD	16	0	0
6	BPBD	12	0	0
7	BPKD	30	2	0
8	Bappeda	16	9	0
9	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	0	0	0
10	Dinas PUTR	17	11	0
11	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	7	0	0
12	Dinas Kesehatan pengendalian penduduk dan KB	7	0	0
13	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	18	0	5
14	Dinas Kominfo	20	0	0
15	Dinas Koperasi & Usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan	11	2	1
16	Dinas Lingkungan Hidup	17	3	0
17	Dinas Pariwisata & Kebudayaan	22	1	0
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa	15	1	2
19	Dinas Pemuda & Olah Raga	57	0	0
20	DPMPTSP	27	0	0
21	Dinas Pendidikan	16	0	1
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB & PP	23	0	0
23	Dinas Perdagangan		0	0
24	Dinas Perhubungan	27	3	0
25	Dinas Perikanan	11	11	0
26	Dinas Pertanian	3	0	0
27	Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman	26	3	2
28	Dinas Sosial	11	0	0
29	Dinas Tenaga Kerja		0	0
30	Satpol PP	21	0	3
31	Bagian Adm. Perekonomian	2	1	0
32	Bagian Adm. Kesra	10	4	0
33	Bagian Adm. Pemerintahan	44	0	0
34	Bagian Hukum	0	1	0
35	Bagian LPBJ	0	0	0
36	Bagian Organisasi	17	26	0
37	Bagian RTP	8	0	0
38	Bagian Umum	8	0	0
39	Kecamatan Candipuro	0	0	0
40	Kecamatan Gucialit	9	2	1
41	Kecamatan Jatiroto	10	0	0
42	Kecamatan Kedungjajang	3	1	4
43	Kecamatan Klakah	25	0	1
44	Kecamatan Kunir	10	0	3

45	Kecamatan Lumajang	21	0	0
46	Kecamatan Padang	9	0	1
47	Kecamatan Pasirian	15	0	0
48	Kecamatan Pasrujambe	24	1	1
49	Kecamatan Pronojiwo	0	0	0
50	Kecamatan Randuagung	0	0	0
51	Kecamatan Ranuyoso	29	0	3
52	Kecamatan Rowokangkung	23	1	1
53	Kecamatan Senduro	0	0	0
54	Kecamatan Sukodono	23	1	0
55	Kecamatan Sumbersuko	38	1	2
56	Kecamatan Tekung	5	0	1
57	Kecamatan Tempeh	12	1	1
58	Kecamatan Tempursari	3	2	1
59	Kecamatan Yosowilangun	32	0	0
60	RSUD Pasirian	8	5	0
61	RSUD dr. Haryoto	5	2	1
62	PD. BPR Bank Pasar	11	0	0
63	PD. SEMERU	0	0	0
64	PDAM	17	1	0
65	Kelurahan Citrodiwangsan	7	0	0
66	Kelurahan Ditotrunan	12	0	0
67	Kelurahan Jogotrunan	10	0	0
68	Kelurahan Jogoyudan	5	0	0
69	Kelurahan Kepuharjo	13	0	0
70	Kelurahan Rogotrunan	4	0	4
71	Kelurahan Tompokersan	6	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>958</b>	<b>67</b>	<b>36</b>

**REKAPITULASI UPDATE INFORMASI LAYANAN PUBLIK SECARA BERKALA  
(DALAM BULAN) SELAMA TAHUN 2022**

<b>Bulan</b>	<b>Informasi Berkala</b>	<b>Informasi Serta Merta</b>	<b>Informasi Setiap Saat</b>
Januari	12	4	0
Februari	10	6	0
Maret	172	7	12
April	17	2	6
Mei	7	2	1
Juni	197	6	4
Juli	121	2	4
Agustus	7	3	5
September	165	12	4
Oktober	50	13	0
November	177	9	0
Desember	23	1	0
<b>Total</b>	<b>958</b>	<b>67</b>	<b>36</b>

**REKAPITULASI UPDATE INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA MELALUI MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK SELAMA TAHUN 2022**

No	Jenis Saluran Informasi	Periode Informasi Bulan												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.	Media Luar Ruang	0	0	2	1	0	1	1	2	4	5	4	3	<b>23</b>
2.	Buletin Jawa Timur	6	10	11	17	13	16	11	13	12	12	12	13	<b>146</b>
3.	News Break	21	42	54	50	42	58	42	46	51	46	46	49	<b>547</b>
4.	Lini Sepuluh	21	46	50	49	41	59	41	47	48	45	50	50	<b>547</b>
5.	Dialog Interaktif	9	12	5	5	6	8	13	11	11	12	11	6	<b>109</b>
6.	Iklan Layanan Masyarakat	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	<b>17</b>
7.	Facebook DIskominfo	14	22	29	31	47	78	29	19	25	35	26	55	<b>410</b>
8.	Twitter Diskominfo	0	10	14	6	2	25	20	20	17	13	15	8	<b>150</b>
9.	Instagram Diskominfo	15	29	38	49	46	85	36	20	26	35	35	65	<b>479</b>
10.	Facebook Pemkab	76	142	103	109	87	135	81	111	84	96	117	107	<b>1248</b>
11.	Twitter Pemkab	90	95	105	78	61	107	77	80	72	87	96	134	<b>1082</b>
12.	Instagram Pemkab	80	144	122	109	88	141	82	112	84	94	117	113	<b>1286</b>
13.	Info Publik	88	74	88	33	66	83	68	72	84	60	80	100	<b>896</b>
14.	Website Pemkab	88	102	88	74	65	92	77	72	68	78	92	113	<b>1009</b>
15.	Media Massa	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	<b>370</b>
	<b>Total</b>	<b>508</b>	<b>728</b>	<b>710</b>	<b>612</b>	<b>565</b>	<b>889</b>	<b>579</b>	<b>626</b>	<b>587</b>	<b>619</b>	<b>705</b>	<b>821</b>	<b>8319</b>

Lampiran 3 : Data Pendukung atas sasaran Meningkatnya Layanan Data dan Statistik Daerah.

No	DAFTAR bidang data yang sudah terintegrasi tahun 2022
1	Bidang Data Komunikasi dan Informatika
2	Bidang Data Kelautan dan Perikanan
3	Bidang Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Bidang Data Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Bidang Data Perdagangan
6	Bidang Data Sosial
7	Bidang Data Pertanahan
8	Bidang Data Pertanian
9	Bidang Data Pendidikan
10	Bidang Data Kesehatan
11	Bidang Data Pariwisata
12	Bidang Data Pangan
13	Bidang Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Bidang Data Perindustrian
15	Bidang Data Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	Bidang Data Perumahan dan Kawasan Permukiman
17	Bidang Data Tenaga Kerja
18	Bidang Data Perhubungan
19	Bidang Data Keuangan
20	Bidang Data Pemerintahan
21	Bidang Data Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	Bidang Data Kearsipan
23	Bidang Data Perpustakaan
24	Bidang Data Statistik
25	Bidang Data Lingkungan Hidup
26	Bidang Data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
27	Bidang Data Kepemudaan dan Olah Raga
28	Bidang Data Penanaman Modal
29	Bidang Data Kebudayaan
30	Bidang Data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lampiran 4 : Data Pendukung atas sasaran Meningkatnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah

<b>NO.</b>	<b>Daftar Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah</b>
<b>1</b>	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>2</b>	Dinas Pendidikan
<b>3</b>	Inspektorat
<b>4</b>	Satuan Polisi Pamong Praja
<b>5</b>	Badan Pengelola Keuangan Daerah
<b>6</b>	Dinas Perhubungan
<b>7</b>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>8</b>	Badan Kepegawaian Daerah
<b>9</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>10</b>	Sekretariat Daerah